

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BPKAD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Henny Puji Astuti¹, Muh. Ilham² & Udaya Madjid³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Correspondence Author: hennypujiastuti@ipdn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyse and describe how much influence regional financial management, accountability and transparency have on the financial performance of the Tanjungpinang City local government. The research method used with a quantitative approach and associative design. The population in this study were civil servants/ASN employees who worked at BPKAD Tanjungpinang City Government as many as 42 people. As a comparison material, the measuring instrument was also distributed at Bappelitbang Tanjungpinang City Government with 51 employees. Thus the total population is 93 people. The sampling technique used is saturated sampling so that 93 respondents are obtained. The data analysis technique used in this research is path analysis. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the significant effect partially or simultaneously of regional financial management, accountability and transparency on the financial performance of the Tanjungpinang City local government is 75.0% while the remaining 25.0% is influenced by other variables outside the research model.

Keyword: *Financial Management, Accountability, Transparency, Financial Performance.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan kendala-kendala akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Mardiasmo (2018) menegaskan: “bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula”. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel.

Penelitian tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah sudah dilakukan oleh Kromen et al (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah, akuntabilitas mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah, transparansi berdampak positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi tata kelola keuangan daerah.

Fenomena terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu terdapat permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Hal tersebut tampak pada capaian realisasi fisik dan keuangan pada belanja APBD Pemko Tanjungpinang sampai dengan bulan Oktober, untuk realisasi fisik sebesar

80,35%, realisasi keuangan sebesar 73,56%. Sedangkan progres kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik triwulan IV (Oktober-Desember per 31 Oktober 2023) realisasi fisik sebesar 98,14% dan keuangan 64,70% (Pemko Tanjungpinang, 2023).

Selanjutnya, fenomena terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu terdapat permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Hal tersebut tampak pada capaian realisasi fisik dan keuangan pada belanja APBD Pemko Tanjungpinang sampai dengan bulan Oktober, untuk realisasi fisik sebesar 80,35%, realisasi keuangan sebesar 73,56%. Sedangkan progres kemajuan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik triwulan IV (Oktober-Desember per 31 Oktober 2023) realisasi fisik sebesar 98,14% dan keuangan 64,70% (Pemko Tanjungpinang, 2023).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2018). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas merupakan suatu konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus akuntabel artinya dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Kriteria akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu dan adanya pemeriksaan (audit)/ respon pemerintah.

Peningkatan akuntabilitas publik dan transparansi akan mewujudkan good corporate governance yang semakin baik. Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Selain itu akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kromen et al (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP). LAKIP Kota Tanjungpinang menyajikan berbagai pencapaian atas sasaran strategis yang

terdapat dalam penetapan kinerja. Ketercapaian kinerja akan tampak dalam pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran rencana strategis.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah transparansi. Menurut Edowati et al., (2021) bahwa:

“Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Suatu instansi pemerintahan dapat dikatakan transparan jika bersifat informatif yang didalamnya mencakup tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan mudah diakses, selanjutnya keterbukaan dan pengungkapan (Mardiasmo, 2018:19). Dengan tercapainya transparansi, maka dapat membantu mengurangi peluang terjadinya kecurangan.

Aparatur perangkat daerah diharapkan memiliki kinerja yang baik yaitu dengan mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Keikutsertaan aparatur dalam proses penganggaran demi peningkatan kinerja, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memuat pedoman penyusunan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD). RKA-SKPD inilah yang disebut sebagai dokumen anggaran partisipatif di Pemda secara internal terkait penentuan alokasi anggaran dan target kinerja yang akan diakomodasi di dalam RAPBD dan akhirnya dalam Perda APBD.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan terhadap pegawai BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang mengenai permasalahan yang dihadapi pegawai mengenai pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi dan kinerja keuangan ditemukan belum adanya pengawasan keuangan yang dilakukan secara rutin dan terencana. Pengawasan keuangan yang selama ini dilakukan sesuai arahan dari pemerintah pusat dan daerah tanpa ada jadwal yang rutin dan terencana. Selanjutnya, permasalahan mengenai akuntabilitas yaitu belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas, pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan anggaran publik belum mendapatkan informasi yang jelas. Dengan demikian, BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas, bahwa belum adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam mengelola anggaran yang dikeluarkan kepada masyarakat. Selanjutnya, permasalahan mengenai prinsip transparansi di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang belum terlaksana secara maksimal dan kurangnya praktik yang sehat dalam keterbukaan pemberian informasi data laporan keuangan kepada publik atau masyarakat yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Sektor publik harus memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data laporan keuangan yang ada di badan publik, karena setiap informasi publik itu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

Kinerja keuangan daerah berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan karena kinerja keuangan Instansi Pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan.

Kinerja keuangan daerah merupakan sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan kata lain, setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja keuangan dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan.

Pengukuran pengelolaan keuangan sebagaimana menurut Kariangan (2017:10) terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Jika perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mampu dijalankan dengan baik maka akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Kinerja keuangan juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja keuangan yang di dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Sebagaimana menurut Halim (2016:132) bahwa dimensi kinerja keuangan adalah ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ketiga dimensi tersebut diukur dengan ketercapaian target atau tujuan, dimana untuk mencapainya dibutuhkan akuntabilitas. Terdapat beberapa dimensi akuntabilitas sebagaimana menurut Ellwood (Mahmudi, 2016:9) yaitu:

“Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Apabila akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan mampu dijalankan dengan baik maka akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah yang baik.”

Selain memiliki kaitan yang erat dengan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, kinerja keuangan juga memiliki keterkaitan dengan transparansi. Hal tersebut karena transparansi akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Sebagaimana menurut Mardiasmo (2018:19) bahwa:

“Dimensi transparansi terdiri dari informatif yang didalamnya mencakup tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan mudah diakses, selanjutnya keterbukaan dan pengungkapan. Apabila semua dimensi transparansi dapat tercapai yaitu mampu memberikan laporan keuangan yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, mudah diakses, terbuka dan mengungkapkan kepada masyarakat mengenai aktivitas dan kinerja finansial maka akan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.”

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2019:65) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas pengelolaan keuangan daerah (X1), akuntabilitas (X2) dan transparansi (X3) terhadap variabel Y yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah (variabel terikat), baik secara parsial maupun simultan. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei, dimana penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai berstatus PNS/ ASN yang bekerja di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 42 orang. Sebagai bahan perbandingan maka alat ukur disebarkan juga di Bappelitbang Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan jumlah pegawai sebanyak 51 orang. Dengan demikian jumlah populasi sebanyak 93 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling jenuh sehingga didapatkan 93 orang responden.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan dianalisis menggunakan bantuan software SPSS 29, terlebih dahulu menentukan persamaan struktur dari diagram jalur. Berikut ini persamaan struktural dalam penelitian ini.

$$Y = \rho_{yx1} + \rho_{yx2} + \rho_{yx3} + e$$

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan struktural dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = 0,212 X_1 + 0,243 X_2 + 0,480 X_3 + e$$

Tabel 2. Hasil Analisis Persamaan Struktural

| Model | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .111 | 1.094 | | .102 | .919 |
| | Pengelolaan Keuangan (X1) | .163 | .068 | .212 | 2.391 | .019 |
| | Akuntabilitas (X2) | .176 | .077 | .243 | 2.293 | .024 |
| | Transparansi (X3) | .281 | .055 | .480 | 5.105 | <.001 |

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)

Nilai koefisien jalur positif menunjukkan pengaruh yang searah artinya jika pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi semakin baik maka akan menyebabkan kinerja keuangan yang baik pula, dan sebaliknya.

Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan, berikut ini hasil analisis menggunakan *path analysis* (analisis jalur) dengan bantuan SPSS 29 :

H₁ : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t signifikansi koefisien jalur.

Tabel 3. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | t_{hitung} | t_{tabel} | Sig. | a | Hasil Uji |
|----------|--------------|-------------|-------|------|-------------|
| X1 ® Y | 2,391 | 1,987 | 0,019 | 0,05 | H1 diterima |

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,391 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,987. Maka t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($2,391 > 1,987$), sehingga H1 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,019 yang berarti lebih kecil dari α ($0,019 < 0,05$), sehingga H1 diterima. Hal ini berarti pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 4. Besarnya Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | Langsung | Tidak langsung melalui | | | Total |
|----------|----------|------------------------|------|------|-------|
| | | X1 | X2 | X3 | |
| X1 ® Y | 4,5% | - | 4,1% | 7,5% | 16,1% |

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan adalah 16,1%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung X1 terhadap Y sebesar 4,5% ($0,212^2 \times 100\%$).
2. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X2 sebesar 4,1% ($0,212 \times 0,798 \times 0,243 \times 100\%$).
3. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3 sebesar 4,1% ($0,212 \times 0,736 \times 0,480 \times 100\%$).

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial akuntabilitas terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t signifikansi koefisien jalur.

Tabel 6. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | t_{hitung} | t_{tabel} | Sig. | a | Hasil Uji |
|----------|--------------|-------------|-------|------|-------------|
| X2 ® Y | 2,293 | 1,987 | 0,024 | 0,05 | H2 diterima |

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,293 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,987. Maka t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($2,293 > 1,987$), sehingga H2 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,024 yang berarti lebih kecil dari α ($0,024 < 0,05$), sehingga H2 diterima. Hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 5. Besarnya Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | Langsung | Tidak langsung melalui | | | Total |
|----------|----------|------------------------|----|------|-------|
| | | X1 | X2 | X3 | |
| X2 @ Y | 5,9% | 4,1% | - | 9,6% | 19,6% |

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan adalah 19,6%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung X2 terhadap Y sebesar 5,9% ($0,243^2 \times 100\%$).
2. Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X1 sebesar 4,1% ($0,243 \times 0,798 \times 0,212 \times 100\%$).
3. Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui X3 sebesar 9,6% ($0,243 \times 0,822 \times 0,480 \times 100\%$).

H₃ : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial transparansi terhadap kinerja keuangan menggunakan uji t signifikansi koefisien jalur.

Tabel 7. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | t _{hitung} | t _{tabel} | Sig. | a | Hasil Uji |
|----------|---------------------|--------------------|---------|------|-------------|
| X3 @ Y | 5,105 | 1,987 | < 0,001 | 0,05 | H3 diterima |

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa uji parsial atau uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,105 dan nilai t_{tabel} yang diperoleh sebesar 1,987. Maka t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($5,105 > 1,987$), sehingga H3 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah < 0,001 yang berarti lebih kecil dari α (< 0,001 kurang dari 0,05), sehingga H3 diterima. Hal ini berarti transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 8. Besarnya Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | Langsung | Tidak langsung melalui | | | Total |
|----------|----------|------------------------|------|----|-------|
| | | X1 | X2 | X3 | |
| X3 @ Y | 23,1% | 7,5% | 9,6% | - | 40,2% |

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan adalah 40,2%. Angka tersebut diperoleh dari pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung X3 terhadap Y sebesar 23,1% ($0,480^2 \times 100\%$).
2. Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y melalui X1 sebesar 7,5% ($0,480 \times 0,736 \times 0,212 \times 100\%$).
3. Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y melalui X2 sebesar 9,6% ($0,480 \times 0,822 \times 0,243 \times 100\%$).

H₄ : Pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama-sama) pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan menggunakan uji F.

Tabel 9. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan

| Variabel | F _{hitung} | F _{tabel} | Sig. Hitung | α | Hasil Uji |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------|------|-------------|
| X1, X2, X3 ® Y | 93,215 | 2,707 | < 0,001 | 0,05 | H4 diterima |

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa uji simultan atau uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 93,215 dan nilai F_{tabel} yang diperoleh sebesar 2,707. Maka F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} (93,215 > 2,707), sehingga H4 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah < 0,001 yang berarti lebih kecil dari α (< 0,001 kurang dari 0,05), sehingga H4 diterima. Hal ini berarti pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 10. Besarnya Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

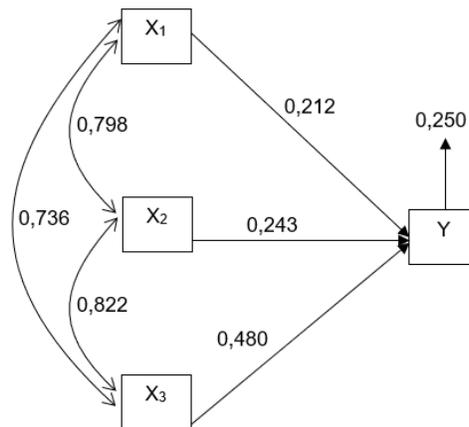
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .871 ^a | .759 | .750 | 2.11841 |

- a. Predictors: (Constant), Transparansi (X3), Pengelolaan Keuangan (X1), Akuntabilitas (X2)
 b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan (Y)

Nilai Adjusted R Square digunakan nilai koefisien determinasi untuk variabel bebas lebih dari dua, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap kinerja keuangan adalah 75,0% (Adjusted R Square), sedangkan sisanya 25,0% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti seperti belanja pemerintah, independent financing, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rasio pajak, rasio retribusi, ukuran dari Pemda dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh gambar diagram jalur dalam penelitian ini mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Jalur Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja keuangan. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,391 sedangkan pada nilai signifikan menunjukkan nilai 0,019 dikarenakan nilai signifikan $< 0,05$ maka dinyatakan variabel pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan banyak pengelola keuangan yang berstatus PNS/ ASN di BPKAD dan Bappelitbang pemerintah daerah Kota Tanjungpinang yang cukup memahami aturan dalam pengelolaan keuangan, dan juga perencanaan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Menurut Liow et al. (2019) kinerja keuangan sendiri tidak terlepas dari cara pengelolaan keuangan itu sendiri, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan dapat memaksimalkan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan program-program maupun mengatasi permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah daerah masing-masing. Tentu dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki, diperlukan tenaga-tenaga profesional dalam bentuk sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni serta sistem informasi yang baik, untuk menciptakan kemampuan pengelolaan yang dapat diandalkan.

Adanya pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan, membuktikan pengelolaan keuangan yang dikerjakan dengan baik dapat meningkatkan kinerja keuangan begitupun sebaliknya, pengelolaan keuangan yang dikerjakan dengan tidak baik maka akan semakin menurunkan kinerja keuangan. Di satu sisi usaha perlu melakukan pengelolaan keuangan secara baik dengan harapan supaya mewujudkan kinerja keuangan yang berkualitas. Oleh sebab itu, mengelola keuangan menjadi salah satu kegiatan yang dibutuhkan supaya prestasi dapat bertambah sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kromen et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi secara positif maupun krusial terhadap kinerja keuangan daerah.

Pada variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan menunjukkan hasil pada nilai thitung sebesar 2,293 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024 sehingga signifikansi $< 0,05$ maka variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Menurut Tarima dan MD (2022), dengan adanya akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah untuk memberikan penjelasan serta menjawab segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah, segala

keputusan, dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Tanjungpinang serius dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akuntabilitas merupakan titik sentral yang mempengaruhi kinerja keuangan pada unit kerja pemerintah daerah Kota Tanjungpinang. Semakin tinggi akuntabilitas yang diberikan dalam menjawab segala hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, maka semakin baik kinerja keuangan yang tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan yang akuntabel dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi, dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang, sejalan dengan pengertian akuntabilitas itu sendiri yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Akuntabilitas menjadi ukuran yang akan menentukan arah kinerja keuangan. Sehingga, dengan adanya akuntabilitas akan mendorong kinerja keuangan yang positif dengan hasil kinerja yang ekonomis, efisien dan efektif dalam pembangunan daerah.

Variabel Transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan hasil nilai t sebesar 5,105 dengan nilai signifikan sebesar $< 0,001$ sehingga nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel transparansi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja keuangan. Menurut Tarima dan MD (2022) bahwa transparansi akan memudahkan masyarakat untuk menilai terkait anggaran dan program yang telah ditetapkan. Transparansi berarti keterbukaan yang menyeluruh dan memberi informasi pada lapisan masyarakat secara utuh tentang fungsi anggaran dalam pemerintahan., dengan adanya transparansi akan berdampak terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian mengartikan bahwa untuk menghindari alokasi anggaran yang kurang tepat di pemerintah daerah, maka diperlukan transparansi. Transparansi meliputi keterbukaan informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam menetapkan anggaran keuangan daerah, dengan adanya transparansi maka akan tercipta horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Apabila informasi tentang anggaran keuangan daerah tersampaikan kepada masyarakat, maka akan mengurangi kontraversional anggaran. Dengan adanya transparansi dari pemerintah daerah juga akan mengurangi kesalahan penyusunan anggaran, karena dengan adanya transparansi maka masyarakat bisa menilai atau mengoreksi jika terjadi kekeliruan. Dengan demikian, transparansi mengakibatkan kinerja keuangan menjadi lebih maksimal dan kegiatan (program) pemerintah daerah menjadi lebih terkendali.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 93,215 dengan nilai signifikan sebesar $< 0,001$ kurang dari 0,05 maka hipotesis secara simultan yakni pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan diterima. Pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang berarti apabila terjadi peningkatan pada pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi maka akan menyebabkan kinerja keuangan akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kromen et al (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur dari tata usaha keuangan daerah yang berperan penting pada proses keuangan daerah secara menyeluruh. Atas dasar itulah, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang layak, masing-masing pihak pengelola perlu merancang laporan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keuangan dan melengkapi laporan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah berimbas positif dan krusial terhadap kinerja keuangan daerah.

Akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan untuk bertanggung jawab atau menjelaskan kinerja maupun tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif ke pihak yang mempunyai wewenang dan berhak guna meminta keterangan terkait pertanggungjawaban. Ketentuan pertanggungjawaban keuangan ialah bertanggung jawab atas dana publik, menyajikan tepat waktu, dan ada pemeriksaan/respons pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah melakukan perbaikan atas sistem pertanggungjawaban agar bisa memaksimalkan kinerja keuangannya. Hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Transparansi/keterbukaan memberikan jaminan atas akses atau keleluasaan untuk masing-masing pihak guna mendapat informasi terkait pelaksanaan pemerintahan, seperti informasi perihal kebijakan, tahap dalam membuat, melaksanakan, dan hasil yang didapat. Transparansi selama menyajikan informasi pun memuat pemahaman bila informasi yang tersampaikan harus tepat, terperinci, dan benar untuk seluruh pemangku kepentingan. Informasi itu pun tidak boleh memuat segala unsur yang disembunyikan, termasuk upaya untuk menunda dalam mengungkapkan. Transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan tata kelola sumber daya publik ke pihak yang memerlukan informasi merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi keuangan maupun informasi lain untuk menentukan keputusan oleh pihak berkepentingan. Transparansi bisa memunculkan pertanggungjawaban horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maka mampu menciptakan pemerintah daerah yang berish, efisien, efektif, dan merespons segala aspirasi maupun kepentingan warganya, yang turut berimbas terhadap kinerja keuangan pemerintah yang meningkat. Hal ini berarti transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian memaparkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti jika pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah maka akan berdampak terhadap kinerja keuangan yang meningkat. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, menjalankan akuntabilitas dan transparansi maka akan menyebabkan peningkatan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dengan analisis jalur, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh signifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang sebesar 16,1%; 2) Terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang sebesar 19,6%; 3) Terdapat pengaruh signifikan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang sebesar 40,2% dan 4) Terdapat pengaruh signifikan secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang sebesar 75,0% sedangkan sisanya 25,0% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. 2021. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai". Indonesian Journal of Business and Management.

- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kariangan, Hendra . 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Pilitik*. Depok: Kencana.
- Kromen, Maria Laetitia Boliina., Henny A. Manafe., M.E. Perseveranda. 2023. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol. 4, No. 4, Maret. 2023. e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246. DOI: <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4>.
- Liow Meilany S.D., Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka. 2019. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota yang Ada di Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.20 No.3.
- Mahmudi. 2016. *Buku Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Riduwan dan Kuncoro Engkos A. 2017. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2019. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Tarima Vicry Raihan, Jamaluddin MD. 2022. “Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggaran terhadap kinerja anggaran pada pemerintah kota Samarinda”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume. 19 Issue 3 (2022) Pages 682-693. ISSN: 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online).